



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ā. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ō. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perikanan dan Pangan

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan dapat disusun sebagaimana mestinya.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renacana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun bertujuan sebagai landasan arah pembangunan selama lima tahun, dengan indikator kinerja yang dirumuskan secara terukur. Penetapan sasaran dan indikator di setiap perjenjangan kinerja, ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dalam ukuran waktu yang jelas.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan diharapkan dapat terlaksana secara optimal dengan Renstra ini sebagai pondasi. Harapan besar ditujukan agar dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Pangan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Painan, 3 September 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si

NIPR19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	38
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	38
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.....	83
BAB V. PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis pada data dan kondisi faktual, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 7. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sektor perikanan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik geografis strategis. Wilayah ini terletak di pesisir bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang garis pantai mencapai 234 kilometer serta memiliki 47 pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir (BPS, 2025).

Kabupaten Pesisir Selatan dilalui 23 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung ekosistem perikanan dan ketahanan pangan daerah (BPS, 2025).

Potensi sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan. Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional (Bapanas 2025), Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 86,71. Dinas Perikanan dan Pangan (2024) melaporkan bahwa nagari rawan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah satu nagari. Ketahanan dan Kerawanan pangan diukur berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Capaian ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah tahan pangan.

Sektor Perikanan merupakan sektor yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Produksi Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 60.943 ton dengan proporsi 76% pada kegiatan penangkapan dan 24% pada kegiatan budidaya. Aspek pemanfaatan dalam sektor perikanan tergambar dari jumlah konsumsi ikan masyarakat 47,53 kg/kapita/tahun (Dinas Perikanan dan Pangan 2024). Berdasarkan data tersebut sektor perikanan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam ketahanan pangan dan struktur perekonomian daerah. Hal ini dapat menjadikannya sektor strategis untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pembangunan pada sektor perikanan dan pangan berperan Dinas Perikanan dan Pangan sebagai Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan (OPD) yang membidangi urusan pangan dan perikanan. Peran ini mendukung terwujudnya visi daerah Kabupaten Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan. Perencanaan Strategis diperlukan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung pencapaian visi daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada prinsip perencanaan yang berbasis data dan bukti, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mengacu pada pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan sinergi lintas sektor. Permendagri 86 Tahun 2017 secara

tegas mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi unsur sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis kondisi faktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7.

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan disusun dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat terukur. Salah satu misi daerah yang dijadikan acuan adalah Sentra Pangan dan Menjadi Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Lebih Sejahtera sebagai refleksi dari kontribusi ketahanan pangan sektor tersebut terhadap daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan sebagai acuan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini, Dinas Perikanan dan Pangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berbasis pada keunggulan lokal, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan adalah untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan pangan di Kabupaten secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2025-2029;

2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang perikanan dan pangan tahun 2025-2029;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan 5 (lima) tahun terakhir diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK. Penyajian pada bab ini memuat :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perikanan dan Pangan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perikanan dan Pangan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan sasaran pelayanan yang ditargetkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan

Penyusunan subbab ini ditentukan melalui Norma, Standa, dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangannya dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029. .

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkaah/upaya yang akan dilakukan. Arah kebijakan dalam renstra merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan serta arah kebijakan RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Subbab ini memuat daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perikanan dan Pangan selama periode renstra

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Anggaran

Subbab ini memuat penentuan target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dan Indikator yang disajikan

merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DNA ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perikanan dan pangan. Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan ke daerah.

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi satu Sub Bagian dan kelompok jabatan, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
3. Bidang Perikanan Budidaya yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
7. UPTD

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum, dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan asset yang jadi tanggung jawab dinas; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan dan tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penatausahaan dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang dan jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak, maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terdiri dari

- a. Kelompok Jabatan Perencanaan dan Pelaporan
- b. Kelompok Jabatan Keuangan

3. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- e. Pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan provinsi, maupun pusat;
- g. Penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
- i. Penilaian lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan lokasi sentra, perikanan budidaya yang terintegrasi;
- j. Pelaksanaan analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
- k. Pelaksanaan analisa usaha budidaya, perlindungan usaha

pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;

- l. Pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan;
- m. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat, dan produksi usaha budidaya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, perlindungan nelayan dan memfasilitasi terbentuknya usaha nelayan kecil, kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
- f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
- g. Penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
- h. Pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
- i. Pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
- j. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
- k. Pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
- l. Pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina usaha perikanan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, penyiapan pelaksanaan

- koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan

7. Jabatan Fungsional

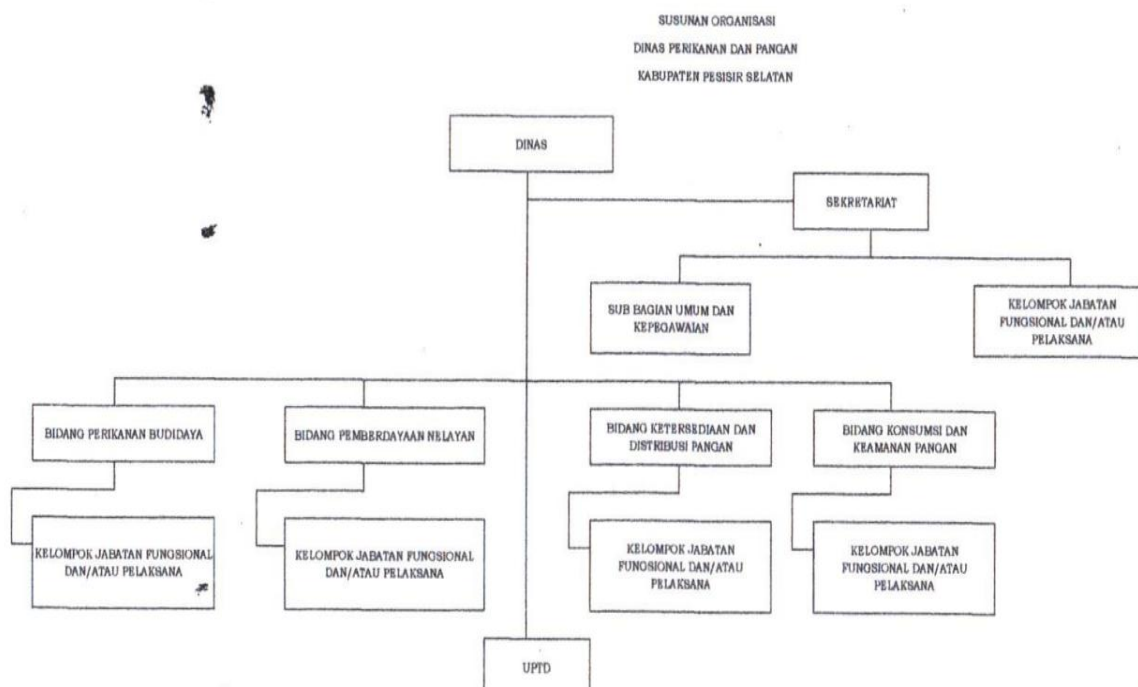
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESIR SELATAN
NO : 19 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA,
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan

a. Sumber Daya Manusia

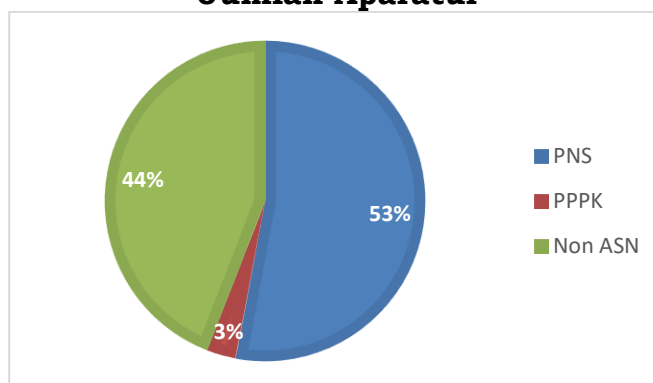
Berdasarkan kondisi per bulan September 2025, jumlah aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 68 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	36	53%
2	PPPK	2	3%
3	Non ASN	30	44%

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari PNS, PPPK dan non ASN dengan persentase 53 % PNS, 3% PPPK dan 44 % Non ASN.

Gambar 2.1
Jumlah Aparatur



Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

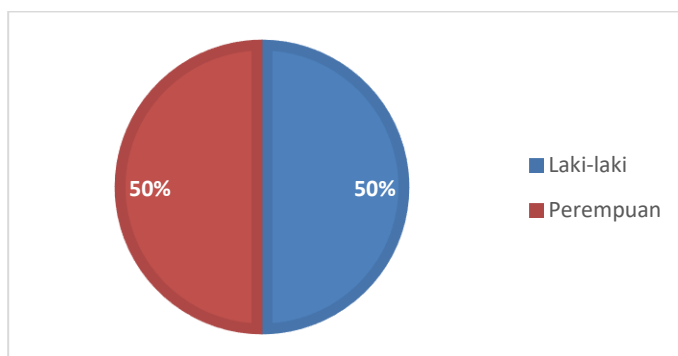
1) Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	19	50,00
2.	Perempuan	19	50,00
Jumlah		38	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

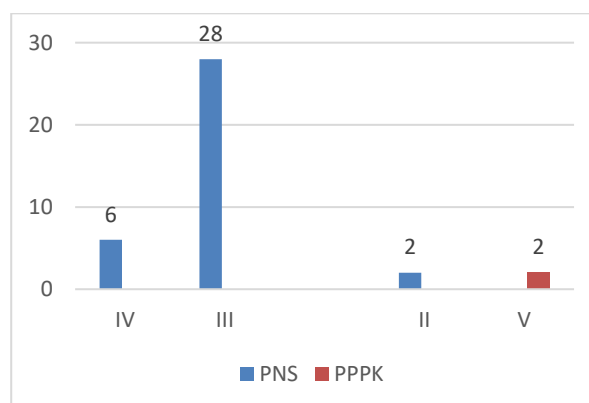
Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Grade	PNS	PPPK
1.	IV	6	0
2.	III	28	0
3.	II	2	0
4.	V	0	2
Jumlah		36	2

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh PNS golongan IV sebanyak

6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%. PPPK sebanyak 2 orang dengan grade V

3) Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

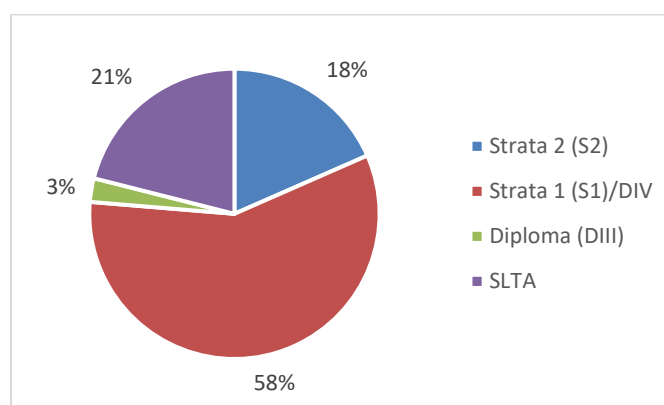
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	22	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	8	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



4) Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
5	Instalasi Lampu	2	
6	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
7	Instalasi Telepon	1	
8	Aset Lainnya	2	
9	Aset Tetap Lainnya	2	
10	Buku Pustaka	2	

Tabel 2.5.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

No	Uraian	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Total
1	Mobil	Unit	5	0	5
2	Motor	Unit	33	3	36
3	Kapal	Unit	1	0	1
4	Tanah	Sertifikat	5	0	5
5	Lemari	Buah	23	26	49
6	Kursi	Buah	141	43	184
7	Filling besi	Buah	13	8	21
8	Meja	Buah	19	58	77
9	AC	Unit	19	0	19
10	Laptop	Unit	30	6	36
11	Komputer PC	Unit	19	12	31
12	Printer	Unit	14	0	14
Total			322	156	478

Beberapa aset yang mengalami kerusakan dalam proses pengusulan panghapusan aset.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan merupakan gambaran menyeluruh dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra sebelumnya. Penilaian ini berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur pencapaian tujuan strategis, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi terhadap capaian indikator menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan. Hasil pengukuran evaluasi kinerja merupakan bentuk keberhasilan capaian dinas.

Perumusan kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi yang lebih objektif guna mencapai keberhasilan pelayanan publik. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan dan Pangan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Dinas Perikanan dan Pangan terbentuk dari penggabungan Dinas Perikanan dan Dinas Pangan pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja awal diukur berdasarkan penetapan pembentukan dinas, yaitu selama periode 2021 – 2024. Pencapaian target dapat dijelaskan melalui tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A (80)	A(80,5)	A (81)	A (81,5)	A (80,86)	A (80,97)	A (81,46)	A (81,46)	1,01	1,01	0,99	
2	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	-	-	-	-	100	100	-	-	63	93	-	-	0,63	0,93
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	80	81	82	84	80,4	86,9	88,9	88,2	1,01	1,07	1,08	1,05
4	Jumlah Produksi Perikanan	-	-	-	46.168	48.977	53.945	50.694	49.641	50.185	72.895	60.943	1,08	1,02	1,35	1,20

Berdasarkan tabel diatas terlihat rasio capaian kinerja diatas 90%. Capaian kinerja pada indikator inovasi daerah pada tahun pertama dan kedua tidak tercantum. Hal ini disebabkan setelah rasionalisasi RPJMD, Dinas Perikanan dan Pangan wajib mencantumkan inovasi daerah Rendahnya capaian tersebut. Analisa capaian kinerja dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Analisa Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Persentase Capaian Tahun ke-				Analisis	Solusi yang Dilakukan
		1	2	3	4		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	101%	101%	99%		belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	- Pengelolaan SDM - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja - Struktur Tata Kelola - Budaya dan Hubungan Organisasi
Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	-	-	63%	93%	Dengan adanya inovasi gemarikan semakin meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan penurunan angka stunting	Semakin ditingkatkannya kematangan inovasi untuk tahun berikutnya
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	101%	107%	108%	105%	Peningkatan skor PPH artinya peningkatan semakin beragamnya konsumsi pangan Masyarakat	gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA) yang akan

							meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	108%	102%	135%	120%	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar	Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan
						Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan alat tangkap ikan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 – 2024 dianalisa menggunakan anggaran dan realisasi. Penghitungan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi menggunakan metode *Compound Annual Growth Rate* (CAGR). CAGR digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan tahunan rata-rata dari suatu nilai selama periode tertentu, dengan asumsi bahwa pertumbuhan terjadi secara konsisten setiap tahun (tabel 2.8).

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Urusan Pangan	Rp 8.223.836.203	Rp 13.126.525.228	Rp 5.510.574.548	Rp 6.060.351.293	Rp 7.181.743.633	Rp 12.724.355.832	Rp 5.236.717.956	Rp 5.602.337.247	87%	97%	95%	92%	-7%	-6%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.285.513.243	Rp 5.202.293.878	Rp 5.045.574.953	Rp 5.437.042.978	Rp 6.303.174.718	Rp 4.943.685.212	Rp 4.836.771.089	Rp 5.049.607.393	87%	95%	96%	93%	-7%	-5%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 627.152.390	Rp 7.466.988.200	Rp -	Rp -	Rp 578.117.450	Rp 7.330.913.895	Rp -	Rp -	92%	98%	0%	0%	-100%	-100%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 266.026.740	Rp 187.189.750	Rp 170.000.019	Rp 560.793.415	Rp 257.922.675	Rp 182.479.200	Rp 159.498.512	Rp 498.994.504	97%	97%	94%	89%	20%	18%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 40.146.630	Rp 241.053.440	Rp 294.999.576	Rp 62.514.900	Rp 37.531.590	Rp 240.276.875	Rp 240.448.355	Rp 53.735.350	93%	100%	82%	86%	12%	9%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 4.997.200	Rp 28.999.960	Rp -	Rp -	Rp 4.997.200	Rp 27.000.650	Rp -	Rp -	100%	93%	0%	0%	-100%	-100%
Urusan Perikanan	Rp 4.076.491.912	Rp 7.967.858.746	Rp 9.624.440.505	Rp 5.012.293.831	Rp 3.993.652.363	Rp 7.750.855.741	Rp 8.721.549.109	Rp 4.835.641.068	98%	97%	91%	96%	5%	5%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.247.811.816	Rp 5.057.742.728	Rp 5.731.273.922	Rp 4.575.288.307	Rp 3.186.527.942	Rp 4.997.393.180	Rp 5.236.185.649	Rp 4.403.263.143	98%	99%	91%	96%	9%	8%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 723.502.120	Rp 1.734.957.860	Rp 1.728.272.760	Rp 374.115.974	Rp 706.029.645	Rp 1.713.535.401	Rp 1.559.543.420	Rp 369.651.825	98%	99%	90%	99%	-15%	-15%
Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Rp 105.177.976	Rp 1.175.158.158	Rp 2.164.893.823	Rp 62.889.550	Rp 101.094.776	Rp 1.039.927.160	Rp 1.925.820.040	Rp 62.726.100	96%	88%	89%	100%	-12%	-11%
T o t a l	Rp 12.300.328.115	Rp 21.094.383.974	Rp 15.135.015.053	Rp 11.072.645.124	Rp 11.175.395.996	Rp 20.475.211.573	Rp 13.958.267.065	Rp 10.437.978.315	91%	97%	92%	94%	-3%	-2%

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan negatif dari tahun awal perencanaan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar program tidak memiliki anggaran. Keterbatasan tersebut akibat dari efisiensi dari beberapa kegiatan yang diprioritaskan. Kabupaten Pesisir Selatan pada Periode 2021-2024 berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim sehingga hanya kegiatan yang prioritas yang mendapatkan pendanaan. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Dana Alokasi Khusus di Bidang Perikanan dan Bidang Pangan tidak tersedia sejak tahun ke 3 dan ke 4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi wilayah yang besar memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan perikanan dan ketahanan pangan. Identifikasi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a) Kesadaran Pelestarian Sumber Daya Alam : Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi perikanan.
- b) Produktivitas dan Daya Saing Rendah: Usaha perikanan didominasi oleh kapal kecil dengan pengolahan hasil yang masih tradisional.
- c) Integrasi Sistem Produksi: Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir menyebabkan lemahnya rantai pasok dan nilai tambah produk perikanan.
- d) Sarana dan Prasarana Terbatas: Keterbatasan fasilitas pengolahan, distribusi, dan belum tersedianya sistem jaminan mutu yang sesuai standar nasional dan ekspor.
- e) Distribusi Benih dan Indukan Unggul: Distribusi benih dan indukan unggul yang belum merata serta tingginya risiko serangan penyakit ikan, terutama pada sektor budidaya.
- f) Diversifikasi Pangan: Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat.

- g) Konsumsi Non-Beras Rendah: Ketergantungan terhadap konsumsi beras yang masih tinggi, sementara konsumsi pangan lokal non-beras seperti umbi-umbian masih rendah.
- h) Daerah Rawan Pangan: Masih adanya daerah rawan pangan, terutama di wilayah terpencil, yang memerlukan perhatian dan intervensi program bantuan pangan.
- i) Keamanan Pangan: Ditemukannya bahan berbahaya dalam makanan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Perikanan dan Pangan lima tahun ke depan antara lain:

- a) Dukungan Kebijakan dan Program: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk kebijakan dan program percepatan pembangunan perikanan.
- b) Permintaan Pasar Meningkat: Permintaan pasar terhadap hasil perikanan terus meningkat, baik dari konsumen lokal, nasional, maupun internasional.
- c) Kemajuan Teknologi Perikanan : Kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi logistik perikanan dan inovasi dalam pengolahan hasil laut, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- d) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, yang berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain.
- e) Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi peluang pasar produk pangan, yang dapat mendorong perekonomian lokal.
- f) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat mendukung percepatan kesadaran terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi.
- g) Perkembangan teknologi informasi, transportasi dan infrastruktur menjadi penunjang penting dalam memperkuat sistem pangan lokal.
- h) Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang melimpah memberikan potensi besar untuk produksi pangan berkelanjutan.

- i) Perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung program diversifikasi pangan berbasis lokal.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan kondisi aktual yang masih relevan untuk lima tahun ke depan. Namun, berbagai peluang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, terutama dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat peran teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perikanan yang berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan urusan pemerintahan, kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan dan Pangan meliputi sasaran layanan urusan pangan dan perikanan. Kelompok sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Urusan Pangan
 - Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - Rumah Tangga Rawan Pangan
 - Nagari Rawan Pangan
 - Balita *Stunting*
- Urusan Perikanan
 - Nelayan, individu atau tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Pembudidaya, individu atau tergabung ke dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
 - Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, individu atau tergabung ke dalam kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)

2.1.5 Mitra Dinas Perikanan dan Pangan

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Perikanan terbagi atas urusan perikanan dan urusan pangan. Optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam tercapainya tujuan. Mitra Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Badan Pangan Nasional
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

Dinas Perikanan dan Pangan selaku pelaksana teknis kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan PDRB, mewujudkan ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja. Upaya mewujudkan hal tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Bidang Perikanan

1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.
2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional
3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut
8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.

2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.
3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal
5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan
6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, Dinas Perikanan dan Pangan perlu merumuskan isu strategis dengan memperhatikan isu lingkungan dinamis global, nasional dan regional. Perumusan ini mencakup hasil telaahan atas laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2024, serta dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Provinsi Sumatera Barat di bidang pangan dan perikanan (lampiran 1). Berdasarkan analisa dan telaahan tersebut dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.
4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman(B2SA).
5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.

7. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal.
8. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.
9. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
10. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
11. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Dinas Perikanan dan Pangan. Dinas Perikanan dan pangan memiliki yang menggambarkan arah pembangunan pada bidang pemerintahan kelautan dan perikanan serta bidang pangan. Tujuan dijabarkan secara spesifik pada sasaran Dinas Perikanan dan Pangan yang disertai oleh indikator yang terukur. Perumusan ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi sektoral dan isu-isu strategis yang berkembang. Rincian tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN											
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86,71	87,47	88,23	91,98	93,47	95,15	96,35	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0	1,76	1,86	2	2,21	2,87	2,96	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	92,96	93,71	94,46	95,22	95,98	96,75	97,53	
			Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,49	81,6	81,75	81,94	82,18	82,47	83
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93	80	81	82	83	84	85	
			Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	68.213,86	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan yang berfokus pada ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Perumusan strategi dalam Renstra ini didasarkan pada prinsip perencanaan berbasis data, sistematis,

dan terukur, yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan strategi ini merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa strategi disusun berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal. Selain itu, strategi juga dirancang dengan memperhatikan kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan perikanan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar.

Strategi yang telah disusun menjadi pedoman dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih operasional melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap strategi diarahkan untuk memastikan pelaksanaan intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan di bidang ketahanan pangan dan perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I 2025	Tahap II 2026	Tahap III 2027	Tahap IV 2028	Tahap V 2029
Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat
Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rumusan teknis dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down-bottom-up*, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan arah kebijakan mempertimbangkan tantangan, isu strategis, serta potensi dan peluang yang telah teridentifikasi dari kondisi internal maupun eksternal.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2025				
No	Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan	Ket
1.	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona	1. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).	
2.	Peningkatan Produksi Budi Daya Berkelanjutan		2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	
			3.Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.	
			4. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.	
			5. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.	
			6. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.	
			7. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.	
			8. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.	
3.	Penguatan diversifikasi dan konsumsi pangan	1. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	1. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.	
		2. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan	
		3. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).	1. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.	
			2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).	
4.	Penguatan penanganan Kerawanan Pangan	4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.	
5	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan	1. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.	

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan ini ditujukan agar pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dapat berjalan terarah, dan konsisten dengan prioritas pembangunan daerah. Rincian strategi dan arah kebijakan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan				
Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor PPH	Peningkatan ketersediaan pangan dan Penguatan Distribusi Pangan	1. Mendukung penjaminan ketersediaan pangan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pangan
				2. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.
				3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.
				4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Peningkatan ketersediaan pangan dan Penguatan Distribusi Pangan	5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
				1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan
				2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).
				1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).
			Peningkatan produktivitas pada bidang perikanan budidaya dan tangkap.	2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
				3. Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.

			Penguatan daya saing hasil perikanan melalui peningkatan mutu, pengolahan, dan pemasaran	1. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.
				2. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.
				3. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.
			Penguatan kelembagaan, SDM, dan tata kelola pembangunan perikanan.	1. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.
				2. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN							
Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)		
					Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)		
		Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
					Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

pangan unggulan	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Inovasi (Inovasi)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

				Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Persentase Konsumsi Energi (%)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan MASYARAKAT	
					Persentase Konsumsi Protein (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

				Cadangan Pangan Daerah	Jumlah penyaluran Pangan Pemerintah (Ton)	Cadangan Kab/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Pangan Pemerintah (Ton)	Cadangan Kab/Kota	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)		2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)		2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)		2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)		2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Optimalnya Penanganan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan	

			Kerawanan Pangan		Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)		
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
				Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

				3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
		Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
	Meningkatnya Produksi	Optimalnya Pemberdayaan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

			Perikanan Budidaya	Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	

				Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K ET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.233.086 .900		8.228.500 .000		9.009.000. 000		9.860.50 0.000		10.802.00 0.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.980.000 .000		6.578.000 .000		7.236.000. 000		7.960.00 0.000		8.756.000 .000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	5.980.000 .000	1	6.578.000 .000	1	7.236.000. 000	1	7.960.00 0.000	1	8.756.000 .000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0	0,18		0,23		0,29		0,35		0,64			
	Persentase Kinerja Bidang/ Sekretari at yang dicapai (%)	100	100		100		100		100		100			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.0 00		174.000.0 00		181.000.0 00		200.000. 000		250.000.0 00		
Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	1	165.000.0 00	1	174.000.0 00	1	181.000.0 00	1	200.000. 000	1	250.000.0 00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen	1	5		5		5		5		5			

	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5	60.000.000	5	63.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3	15.000.000	3	16.000.000	3	17.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	60.000.000	6	63.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	100.000.000		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.451.000.000		4.594.000.000		4.817.000.000		5.300.000.000		5.960.000.000		
Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.451.000.000	36	4.594.000.000	36	4.817.000.000	40	5.300.000.000	50	5.960.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.200.000.000		4.340.000.000		4.550.000.000		5.000.000.000		5.650.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.200.000.000	36	4.340.000.000	36	4.550.000.000	40	5.000.000.000	50	5.650.000.000		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				210.000.000		210.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1	210.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		

2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				69.000.000		73.000.000		75.000.000		82.000.000		82.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	69.000.000	1	73.000.000	1	75.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		26.000.000		27.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	4	10.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		

	pada SKPD (Laporan)													
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.000.000		36.000.000		37.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	34.000.000	1	36.000.000	1	37.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		55.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		55.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.000.000		427.000.000		464.000.000		495.000.000		574.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	358.000.000	1	427.000.000	1	464.000.000	1	495.000.000	1	574.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	24.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.500.000		30.000.000		31.000.000		35.000.000		40.000.000		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	28.500.000	12	30.000.000	12	31.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		36.000.000		36.500.000		37.500.000		38.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	37.500.000	1	38.500.000		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000		240.000.000		480.000.000		530.000.000		350.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	180.000.000	70	240.000.000	70	480.000.000	35	530.000.000	35	350.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8		8		9		22		10			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.000.000		200.000.000		280.000.000		250.000.000		200.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	140.000.000	70	200.000.000	70	280.000.000	35	250.000.000	35	200.000.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		200.000.000		280.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8	40.000.000	8	40.000.000	9	200.000.000	22	280.000.000	10	150.000.000		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000		408.000.000		431.000.000		460.000.000		495.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	395.000.000	1	408.000.000	1	431.000.000	1	460.000.000	1	495.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.000.000		98.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	95.000.000	1	98.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000		
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		160.000.000		161.000.000		170.000.000		175.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	150.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.000.000		607.000.000		718.000.000		818.000.000		970.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	312.000.000	1	607.000.000	1	718.000.000	1	818.000.000	1	970.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66		66		66		66		66			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				58.000.000		61.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1	1	58.000.000	1	61.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		175.000.000		261.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39	150.000.000	39	175.000.000	39	261.000.000	39	300.000.000	39	350.000.000		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	16.000.000	20	16.000.000	20	17.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66	23.000.000	66	25.000.000	66	25.000.000	66	30.000.000	66	30.000.000		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	40.000.000	5	180.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		

2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	85	100	515.000.000	100	550.500.000	100	591.000.000	100	636.500.000	100	692.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	14,15	40		60		80		100		100			
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	515.000.000	2	550.500.000	2	591.000.000	2	636.500.000	2	692.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	0	4		4		4		4					
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				500.000.000		535.000.000		575.000.000		620.000.000		675.000.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	500.000.000	2	535.000.000	2	575.000.000	2	620.000.000	2	675.000.000		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	0	4	15.000.000	4	15.500.000	4	16.000.000	4	16.500.000	4	17.000.000		

	Infrastruktur Logistik (Laporan)													
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				567.099.700		909.000.000		975.000.000		1.042.000.000		1.096.000.000		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Protein (%)	91	97	567.099.700	98	909.000.000	99	975.000.000	100	1.042.000.000	100	1.096.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.460	2.600		2.650		2.650		2.700		2.700			
	Persentase Konsumsi Energi (%)	93	98,5		98,8		99		99,2		99,2			
	Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	68	72		73		75		75		75			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				330.042.400		405.000.000		430.000.000		485.000.000		510.000.000		
Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	330.042.400	12	405.000.000	12	430.000.000	12	485.000.000	12	510.000.000		
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40		60		80		100		120			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1	30.000.00 0	1	33.000.00 0	1	34.000.00 0	1	35.000.0 00	1	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan				50.000.00 0		70.000.00 0		90.000.00 0		110.000. 000		130.000.0 00		

Ketahanan Pangan Keluarga														
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40	50.000.000	60	70.000.000	80	90.000.000	100	110.000.000	120	130.000.000		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				80.042.400		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12	80.042.400	12	120.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		

Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				167.057.3 00		389.000.0 00		400.000.0 00		412.000. 000		436.000.0 00		
Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	167.057.3 00	21	389.000.0 00	21	400.000.0 00	21	412.000. 000	21	436.000.0 00		
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10		21		21		21		21			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				142.056.9 00		330.000.0 00		340.000.0 00		350.000. 000		370.000.0 00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	142.056.9 00	21	330.000.0 00	21	340.000.0 00	21	350.000. 000	21	370.000.0 00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				25.000.40 0		59.000.00 0		60.000.00 0		62.000.0 00		66.000.00 0		
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10	25.000.40 0	21	59.000.00 0	21	60.000.00 0	21	62.000.0 00	21	66.000.00 0		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				70.000.00 0		115.000.0 00		145.000.0 00		145.000. 000		150.000.0 00		

Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	70.000.000	1	115.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	50.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				140.987.200		158.000.000		173.000.000		187.000.000		222.000.000		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	25	140.987.200	20	158.000.000	15	173.000.000	10	187.000.000	5	222.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		

Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000		113.000.000		124.000.000		135.000.000		166.000.000		
Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	110.000.000	1	113.000.000	1	124.000.000	1	135.000.000	1	166.000.000		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				80.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000		

2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	3,7	8,7	30.000.000	11,2	33.000.000	13,7	34.000.000	16,3	35.000.000	16,3	36.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.110.000.000		4.058.000.000		4.376.300.000		4.652.930.000		5.102.300.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.445.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		2.870.000.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	42.628,31	47.263,5	2.445.000.000	48.016,82	2.720.000.000	48.782,15	2.770.000.000	49.559,68	2.820.000.000	50.760,45	2.870.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.395.000.000		2.670.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	2.395.000.000	5	2.670.000.000	5	2.720.000.000	5	2.770.000.000	5	2.820.000.000		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	100		105		110		115		120			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20		20		20		20		20			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				2.275.000.000		2.550.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		

Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	130	2.275.000.000	135	2.550.000.000	140	2.600.000.000	145	2.650.000.000	150	2.700.000.000		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30	300.000.000,00	30	310.000.000,00	30	320.000.000,00	30	330.000.000,00	30	340.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				415.000.000		1.083.000.000		1.351.300.000		1.572.930.000		1.972.300.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	14.183,66	15.725,7	415.000.000	15.977,31	1.083.000.000	16.232,95	1.351.300.000	16.492,68	1.572.930.000	16.893,75	1.972.300.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				115.000.000		750.000.000		1.005.000.000		1.215.500.000		1.581.550.000		

Optimalnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	115.000.000	6	750.000.000	6	1.005.000.000	6	1.215.500.000	6	1.581.550.000		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2		9		12		15		18			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1		5		5		5		5			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		670.000.000		920.000.000		1.120.000.000		1.480.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2	50.000.000	9	670.000.000	12	920.000.000	15	1.120.000.000	18	1.480.000.000		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1	50.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.500.000	5	66.550.000		

3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	15.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				300.000.000		333.000.000		346.300.000		357.430.000		390.750.000		
Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	300.000.000	30	333.000.000	30	346.300.000	35	357.430.000	35	390.750.000		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		44.200.000		

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	44.200.000		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		230.000.000		230.000.000		250.000.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		50.000.000		25.000.000		27.000.000		30.000.000		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	50.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000	35	60.500.000	35	66.550.000		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		

Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0	324,99	210.000.000	488,24	210.000.000	756,77	210.000.000	1.172,99	210.000.000	1.559,66	210.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,77	35,69		35,73		35,78		35,83		35,83			
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		

Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Skala Usaha dan Risiko														
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
6.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana table berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	81,49	81,60	81,75	81,94	82,18	82,47	83	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	60.942,68	62.000	63.304,20	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	
5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	93	80	81	82	83	84	85	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan dan Pangan

INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

Persentase Jumlah Cadangan Pangan	komulatif	Persentase	14,15	20	40	60	80	100	100	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Positif	Ton	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan , disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

LAMPIRAN

1. Perumusan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global *	Nasional **	Regional ***	
1.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penghasil pangan pokok terbesar di Sumatera Barat	1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Terdapat <i>hidden cost</i> dari aspek lingkungan, sosial dan kesehatan akibat pola konsumsi pangan tidak sehat	1. Akses Pangan yang tidak merata	1. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan	1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
		2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.		2. Ketimpangan beban dan manfaat yang ditanggung berupa masalah distribusi, keamanan pangan dan gizi yang diterima konsumen	2. Sebaran Wilayah Produksi di daerah tertentu menyebabkan distribusi searah	2. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan	2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
		3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).		3. Minimnya Integrasi Biaya Sosial-Lingkungan dalam Kebijakan Publik dan Harga Pangan	3. Rantai Distribusi yang panjang menyebabkan disparitas harga	3. Masih ditemuinya daerah rawan pangan	3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.

		4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan local			4. Peningkatan Jumlah Penduduk	4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
		5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan			5. Belum Idealnya Pola Pangan harapan Masyarakat	5. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal	5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
		6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan			6. Keamanan Pangan	6. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal	6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.
2.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan perikanan	1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Ketimpangan perkembangan akuakultur antarwilayah	1. Peningkatan Jumlah Penduduk	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan	1. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal
		2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional		2. Penurunan stok ikan	2. Degradasi Laut dan Polusi	2. Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap melalui alokasi yang profesional antara stok sumberdaya ikan, kemampuan sumberdaya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan	2. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.

3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya		3. Keterbatasan Perlindungan Nelayan Kecil	3. IUU dan Overfishing	3. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan	3. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		4. Ancaman perubahan iklim & polusi laut	4. Perubahan Iklim	4. Peningkatan inovasi teknologi pembenihan dan induk unggul komoditas strategis	4. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar		5. Potensi limbah yang belum dioptimalkan		6. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya	5. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan				7. Diversifikasi konsumsi produk olahan ikan	
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut				8. Penyediaan penyaluran bantuan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang terkena dampak perubahan iklim/ bencana	

		8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				9. Pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan, serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan	
		9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.				10. Masih rendahnya daya saing produk hasil perikanan	

*FAO. 2024. The State of Food and Agriculture 2024 – Value-driven transformation of agrifood systems.

FAO. 2024. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action.

** Rancangan Awal Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024

***Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
1.	Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	Hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada level Perangkat Daerah (PD) oleh Inspektorat Daerah	$\sum_{i=1}^n (B_i \times N_i)$ B_i = Bobot komponen ke-i N_i = Nilai capaian komponen ke-i (skala 0-100) n = Jumlah komponen yang dinilai
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	Nilai Kematangan dari inovasi yang dilakukan	Nilai kematangan inovasi berdasarkan aplikasi IGA
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	Susunan konsumsi pangan yang terdiri dari berbagai kelompok pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, budaya lokal, serta potensi sumber daya daerah, untuk mewujudkan gizi seimbang dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.	Akumulasi capaian konsumsi pangan
3.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	ton	Jumlah hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan perikanan dalam kurun waktu tertentu yang dihitung dalam satuan berat (ton)	Akumulasi produksi perikanan
NO	SASARAN TAKTIKAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	Peningkatan nilai AKIP per Tahun	$\frac{\text{Nilai tahun } n+1 - \text{Nilai tahun } n}{\text{Nilai tahun } n} \times 100\%$
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	%	Persentase kinerja bidang tercapai dalam fisik dan keuangan	Hasil pengukuran aplikasi simbangda
		Jumlah Inovasi	Tanpa Satuan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	%	Meningkatkan Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertanganij)*100%
2.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	Kg/Kapita/Tahun	ukuran jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu dalam suatu daerah	Ketersediaan Protein Pangan / (jumlah penduduk*365)*100%
		Angka Ketersediaan Protein	gr/kapita/tahun	persentase jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita penduduk dalam bentuk protein	Ketersediaan Pangan Pokok yg dikonsumsi/ (jumlah penduduk*365)*100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif	%	Persentase Gapoktan LPM yang aktif	(Jumlah LPM/Jumlah LPM yg aktif)*100%
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
4.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%		
5.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi Persentase Konsumsi Protein	% %		
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
6.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton		
7.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan	ton Kg/Kapita/Tahun		
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton		
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1.	Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase dokumen publik dan dipublish Jumlah Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	% Dokumen		
	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen		
	Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan	Dokumen		
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
2.	Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan yang ditangani Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia	Rumah Tangga Dokumen	Meningkatnya pengelolaan penanganan Nagari Rawan Pangan Dokumen Analisa Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertanganij)*100% Jumlah dokumen FSVA yang tersedia
3.	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan	ton	Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	Cadangan Pangan Masyarakat + Cadangan Pangan Pemerintah

5.	Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	- Jumlah Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan - Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan	Lembaga Lumbung Pangan Dokumen	Lumbung Pangan Masyarakat yang melaksanakan peningkatan kapasitas upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di daerah yang rawan pangan	Jumlah LPM yang melaksanakan peningkatan kapasitas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan GPM
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
6.	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	- Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian	Jumlah rekomendasi
7.	Optimalnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan	%	Keragaman konsumsi pangan perkelompok pangan merujuk pada variasi dan perbedaan dalam konsumsi pangan antara kelompok pangan berbeda	
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
8.	Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	- Jumlah SOP dan Layanan tempat pendisrutan ikan - Jumlah data dan informasi Perikanan Tangkap	ton Dokumen		
9.	Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	- Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya - Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan kemitraan usaha	Orang Kelompok		
10.	Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Pengujian Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha mikro dan kecil - Jumlah Rekomendasi SKP Produk Unit Usaha/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia	Rekomendasi Dokumen Unit		
11.	Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memperoleh pembinaan dan pelatihan teknis - Jumlah Pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan - Jumlah promosi hasil perikanan dalam rangka pencapaian Angka Konsumsi Ikan	Unit Usaha Pelaku Usaha Kegiatan		
BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN					
12.	Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Pembudidayaan ikan yang meningkat pendapatannya - Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya - Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi - Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Orang ha ekor Dokumen	Paket bantuan yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan pembudidayaan ikan Pertambahan Luas Lahan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan Produksi benih budidaya air tawar dan air payau yang dihasilkan Pengambilan sampel air pada kelompok untuk diuji kualitas airnya	Jumlah pembudidayaan yang meningkat pendapatannya Jumlah pertambahan luas lahan Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi BBI dan UPR Jumlah dokumen Pengujian Kualitas Air
13.	Optimalnya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/dan iptek dan penguatan kelembagaan)	Orang	Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan	Jumlah Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan